

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan berupa laporan keuangan dan tahunan perusahaan sampel pada rentang waktu penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2015. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang mana menghasilkan data sejumlah 123 sampel.

Tabel 4.1
Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Penetapan Sampel	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2015	128	130	132	137	141	143	811
2	Perusahaan yang tidak konsisten mempublikasikan laporan tahunan	38	39	34	35	41	42	229
3	Perusahaan yang mengalami kerugian pada rentang periode penelitian	18	15	23	29	30	31	146
4	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data	46	50	49	47	44	44	280
5	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	26	26	26	26	26	26	156
7	Data Outlier							33
8	Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian	123						

Sumber: Rekonsiliasi sampel oleh peneliti

B. Uji Kualitas Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data dalam penelitian dalam bentuk nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standart deviasi (Nazaruddin dan Basuki, 2015).

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Penelitian Perusahaan Manufaktur
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	123	,100000	,460000	,2456	,05700
CSR_D	123	,020000	,240000	,1361	,04271
KI	123	,002509	1,121067	,53327531	,263708968
KM	123	,000005	,256198	,06439462	,083779815
KOI	123	,270000	,750000	,3753	,09718
KOA	123	2,00000	5,000000	3,0894	,42481
KMxKOI	123	,000002	,084545	,02223589	,028110124
KMxKOA	123	,000015	1,153846	,19730145	,262088309
Valid N (listwise)	123				

Sumber data: data sekunder diolah

Berdasarkan analisis dan hasil statistik deskriptif yang tampak pada Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah data (N) yang digunakan untuk menganalisis masing-masing variabel berjumlah sama yaitu 123 sampel. Nilai maksimum menunjukkan kisaran nilai terbesar yang ada dalam penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan kisaran nilai terkecil yang ada dalam penelitian. Nilai rata-rata menunjukkan kisaran nilai dari total nilai masing-masing variabel dibagi jumlah sampel. Sedangkan standart deviasi menunjukkan simpangan data yang ada dalam penelitian.

Selanjutnya analisis nilai maksimum, nilai minimum, dan standart devisi masing-masing variabel sebagai berikut:

- a. Variabel agresifitas pajak (CETR) memiliki nilai maksimum sebesar 0,10; nilai minimum sebesar 0,46; nilai rata-rata sebesar 0,2456 dan standart deviasi 0,05700. Dapat dijelaskan bila perusahaan di Indonesia rata-rata melakukan tindakan agresifitas pajak sebesar 24% dan maksimum sebesar

46% sedangkan minimal perusahaan melakukan agresifitas pajak sebesar 10%. Walaupun tidak sampai 50% namun persentase maksimal ini menunjukkan bila agresifitas pajak diduga merupakan tindakan yang biasa dilakukan perusahaan untuk meminimalisir jumlah pajak terhutangnya.

b. Variabel pengungkapan CSR (CSR_D) memiliki nilai maksimum sebesar 0,24; nilai minimum sebesar 0,02; nilai rata-rata sebesar 0,1361 dan standart deviasi sebesar 0,04271. Hasil pengujian ini menggambarkan bila kesadaran perusahaan di Indonesia melakukan pengungkapan CSR masih rendah yaitu berkisar 13%. Sedangkan persentase terbesarnya 24%. Rendahnya kesadaran perusahaan mengungkapkan aktivitas CSR dapat disebabkan karena pengungkapan CSR tidak menjadi salah satu prioritas perusahaan dalam laporan tahunan.

c. Variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai maksimum sebesar 1,121067; nilai minimum sebesar 0,002509; nilai rata-rata sebesar 0,53327 dan standart deviasi sebesar 0,26371. Hasil pengujian ini menggambarkan bila di Indonesia kepemilikan Struktur kepemilikan institusional pada perusahaan di Indonesia minimal 0,25% sahamnya dimiliki pihak institusi diluar perusahaan. Bahkan ada perusahaan yang 100% lebih sahamnya milik pihak institusi. Namun, kepemilikan pihak institusi di Indonesia tergolong cukup tinggi yang mana rata-rata sebesar 53% dari jumlah saham beredar. Contoh perusahaan yang seluruhnya merupakan milik

institusional adalah perusahaan dengan saham mayoritas milik pemerintah seperti PT Kimia Farma, Tbk.

- d. Variabel kepemilikan manajerial (KM) memiliki nilai maksimum sebesar 0,2561; nilai minimum sebesar 0,000005; nilai rata-rata sebesar 0,064394 dan standart deviasi sebesar 0,08378. Proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan di Indonesia tidak lebih besar dari proporsi kepemilikan saham institusional. Hasil menunjukkan proporsi kepemilikan saham manajerial di Indonesia maksimal terbesar 26% dan minimal 0,0005% dengan rata-rata proporsi kepemilikan sebesar 6,4%. Melalui proporsi kepemilikan ini pemilik saham manajerial berhak untuk ikut mengawasi jalannya perusahaan walaupun kewenangannya tidak sama dengan pemilik saham yang memiliki proporsi lebih besar.
- e. Variabel komisaris independen (KOI) memiliki nilai maksimum sebesar 0,75; nilai minimum sebesar 0,27; nilai rata-rata sebesar 0,3753 dan standart deviasi sebesar 0,09718. Rata-rata proporsi komisaris independen yang menjadi bagian dari dewan komisaris pada perusahaan di Indonesia adalah sebesar 37% dengan nilai tersebar 75%. Persentase ini telah melebihi ketentuan yang diatur yaitu sebesar 30% dari proporsi dewan komisaris perusahaan. Dapat dikatakan apabila komisaris independen mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka pengawasan terhadap perusahaan akan meningkat.

- f. Variabel komite audit (KOA) memiliki nilai maksimum sebesar 5; nilai minimum sebesar 2; nilai rata-rata sebesar 3,0894 dibulatkan 3 dan standart deviasi sebesar 0,42481. Jumlah komite audit pada perusahaan tidak di tentukan berdasarkan persentase melainkan langsung pada jumlah minimal sebanyak 3 orang. Berdasarkan hasil menunjukkan rata-rata jumlah komite audit di perusahaan sesuai dengan ketentuan yaitu sebanyak 3 orang. Walaupun ada perusahaan yang memiliki komite audit mencapai maksimal 5 orang, dan minimal 2 orang. Jumlah komite audit akan mempengaruhi efektifitas kinerja dalam pengawasan kinerja perusahaan khususnya dalam upaya penyusunan laporan keuangan.
- g. Variabel interaksi komisaris independen pada hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap agresifitas pajak (KMxKOI) memiliki nilai maksimum sebesar 0,084545; nilai minimum sebesar 0,000002; nilai rata-rata sebesar 0,0222 dan standart deviasi sebesar 0,02811. Dalam upaya memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap agresifitas pajak berdasarkan uji deskriptif statistik ditunjukkan bila komisaris independen rata-rata dapat memoderasi sebesar 2,22% maksimal komisaris independen dapat memoderasi sebesar 8% dan minimal 0,0002%. Persentase ini tergolong kecil untuk dapat menekan terjadinya agresifitas pajak namun tidak menutup kemungkinan jika ada efektifitas kinerja.

h. Variabel interaksi antara komite audit pada hubungan kepemilikan manajerial terhadap agresifitas pajak (KMxKOA) memiliki nilai maksimum sebesar 1,15; nilai minimum sebesar 0,000015; nilai rata-rata sebesar 0,1973 dan standart deviasi sebesar 0,26209. Berbeda dengan variabel komisaris independen, dalam upaya memoderasi hubungan kepemilikan manajerial terhadap agresifitas pajak. Komite audit dapat memoderasi hubungan kedua variabel rata-rata sebesar 19,7%. Komite audit minimal dapat memoderasi hubungan keduanya sebesar 0,0015% dan lebih dari 100% dapat memoderasi. Hasil ini jauh lebih besar dibanding dengan hasil yang ditunjukkan oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit dengan efektifitas kinerja dapat menekan tindakan pajak agresif pemilik saham manajerial selama dapat mencapai kinerja yang baik.

C.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui pola sebaran data dalam penelitian. Uji statistik yang bisa digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov (KS). Kriteria penerimaan data dikatakan berdistribusi normal adalah dengan membandingkan besarnya nilai Asymp. Sig (2-tailed) dengan tingkat signifikansi (α) 5% atau 0,05.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kormogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		123
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04177125
Most Extreme Differences	Absolute	,053
	Positive	,033
	Negative	-,053
Kolmogorov-Smirnov Z		,590
Asymp. Sig. (2-tailed)		,878

Sumber data : data sekunder yang diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas kedua model diatas yang ditunjukkan oleh tabel dapat diketahui bila nilai Asymp. Sig $> \alpha$ (0,05). Nilai Asymp. Sig pada Tabel 4.3 sebesar $0,878 > 0,05$. Artinya kedua model memiliki data yang berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam penelitian. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) atau nilai *tolerance* yang ada dalam *collinearity statistic*. Kriteria penerimaan data terbebas dari multikolinearitas adalah jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 10% atau 0,1. Analisis multikolinearitas khususnya pada penelitian menggunakan variabel moderasi dapat dilakukan dengan mentransformasi data kedalam variabel *standardized* (Zscore) dan mengabsolutkan selisih nilai variabel yang dimoderasi dengan variabel moderasinya untuk menghindari multikolinearitas dan autokorelasi.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	β	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-,247	,011		-22,270	,000		
(CSR_D)	-,005	,004	-,093	-1,215	,227	,768	1,302
(KM)	-,022	,008	-,392	-2,965	,004	,258	3,869
(KI)	,007	,005	,116	1,375	,172	,638	1,566
(KOI)	-,003	,009	-,052	-,320	,750	,173	5,766
(KOA)	-,022	,005	-,389	-4,297	,000	,551	1,816
(KM x KOI)	-,019	,009	-,375	-2,048	,043	,134	7,445
(KM x KOA)	,021	,006	,376	3,694	,000	,436	2,296

Sumber data : data sekunder diolah

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.4 menunjukkan besarnya nilai VIF seluruh variabel < 10 dan *tolerance* > 0,1 atau 10%.

Artinya Artinya tidak ada korelasi yang terlalu tinggi diantara variabel independen, maka dapat dikatakan bila model penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada pengamatan satu dengan pengamatan lain pada model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 2015). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW) pada model *summary* yang mana data dikatakan bebas autokorelasi apabila nilai $du < dw < 4-du$. Dalam pengujian dengan variabel moderasi rawan dengan asumsi autokorelasi. Maka bisa digunakan metode nilai selisih mutlak untuk menghindarinya.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi
Summary Model

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,694(a)	,481	,450	,04228	2,123

Hasil uji autokorelasi ditunjukkan pada Tabel 4.5. Nilai DW yang ditunjukkan pada tabel 4.5 sebesar 2,123. Berdasarkan hasil pengujian dengan nilai tabel durbin watson perbandingan diketahui hasil uji autokorelasi $du = 1,832$; $dl = 1,637$ dan $4-du = 2,168$. Dapat diketahui bila kriteria bebas autokorelasi terpenuhi dengan $du < dw < 4-du$. Artinya data terbebas autokorelasi yang mana tidak ada korelasi yang terjadi antara residual pengamatan satu dengan residual pengamatan lain.

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada persamaan regresi. Penelitian ini menggunakan metode uji glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2011). Data terindikasi heteroskedastisitas apabila nilai $\text{sig} < \alpha$ (0,05) dan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$. Sebaliknya data bebas heteroskedastisitas apabila nilai $\text{sig} > \alpha$ (0,05).

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	β	Std. Error	Beta		
(Constant)	,086	,028		3,099	,002
CSR_D	-,053	,059	-,091	-,901	,369
KI	-,018	,011	-,192	-1,668	,098
KM	,301	,338	1,012	,889	,376
KOI	,006	,026	,025	,245	,807
KOA	-,011	,008	-,192	-1,456	,148
KMxKOI	-,960	,699	-1,084	-1,373	,172
KMxKOA	-,006	,068	-,067	-,095	,925

Hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.6 diatas dapat diketahui bila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari α (0.05). Berdasarkan kriteria pengujian heteroskedastisitas dengan uji glejser di dapat bila asumsi homokedastisitas terpenuhi yang ditunjukkan dengan nilai $\text{sig} > \alpha$ (0,05). Artinya data terbebas dari heteroskedastisitas.

E. Hasil Uji Hipotesis dan Analisis Data

1. Uji Koefisien Determinansi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan model menjelaskan variasi variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 menunjukkan semakin besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai *adjusted R square* hal ini karena dalam penelitian menggunakan lebih dari dua variabel.

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,694(a)	,481	,450	,04228	2,123

Sumber data : Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil uji koefisiensi determinasi seperti pada Tabel 4.7 diatas, diketahui besarnya nilai adjusted R square pada persamaan sebesar 0,450 atau 45%. Artinya, sebesar 45% variasi tindakan agresifitas pajak dapat dijelaskan melalui variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

2. Uji F

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Hasil pengujian uji F terlihat pada tabel anova yang ditunjukkan melalui besaran nilai sig dan F hitung. Kriteria penerimaan pengujian ini apabila nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05) yang artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila nilai signifikansi $> \alpha$ (0,05) artinya secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Nazaruddin dan Basuki, 2015).

Tabel 4.8
Hasil Uji F
Anova

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,191	7	,027	15,256	,000(a)
Residual	,206	115	,002		
Total	,396	122			

Berdasarkan hasil uji F seperti tampak pada Tabel 4.8 diatas dapat diketahui besarnya nilai signifikansi masing-masing model sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05) yang artinya secara simultan variabel-variabel independen pada kedua model berpengaruh terhadap agresifitas pajak. Variabel pengungkapan CSR, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan kedua interaksi variabel moderasi secara simultan berpengaruh terhadap agresifitas pajak.

3. Uji t

Uji t dalam analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil pengujian uji t ditunjukkan pada tabel *coefficients* yang mana kriteria penerimaan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial apabila nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05), sebaliknya apabila nilai signifikansi $> 0,05$ variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9
Hasil Uji t
Coefficients

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	β	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-,247	,011		-22,270	,000		
(CSR_D)	-,005	,004	-,093	-1,215	,227	,768	1,302
(KM)	-,022	,008	-,392	-2,965	,004	,258	3,869
(KI)	,007	,005	,116	1,375	,172	,638	1,566
(KOI)	-,003	,009	-,052	-,320	,750	,173	5,766
(KOA)	-,022	,005	-,389	-4,297	,000	,551	1,816
(KMxKOI)	-,019	,009	-,375	-2,048	,043	,134	7,445
(KMxKOA)	,021	,006	,376	3,694	,000	,436	2,296

Sumber data : data sekunder diolah

Berdasarkan hasil uji t seperti tampak pada Tabel 4.9 diatas diketahui variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen adalah variabel kepemilikan manajerial (KM), komite audit (KOA), dan interaksi hubungan kepemilikan manajerial dan komisaris independen (KMxKOI). Sedangkan variabel pengungkapan CSR, komisaris independen (KOI)

kepemilikan institusional (KI), dan interaksi hubungan kepemilikan manajerial dan komite audit (KMxKOA) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berkaitan dengan kriteria penerimaan hipotesis tidak sekedar melihat nilai signifikansi saja namun juga besarnya nilai Beta (β). Pada tabel 4.9 variabel pengungkapan CSR memiliki nilai β sebesar -0,005 dan nilai sig 0,227 dapat dikatakan bila pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap agresifitas pajak. Kepemilikan institusional memiliki nilai β sebesar 0,007 dan nilai sig 0,172 dapat dikatakan bila kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresifitas pajak. Kepemilikan manajerial memiliki nilai β sebesar -0,022 dan nilai sig 0,004 dapat dikatakan bila kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap agresifitas pajak. Komite audit memiliki nilai β -0,022 dan nilai sig sebesar 0,000 yang komite audit berpengaruh terhadap agresifitas pajak. Komisaris independen memiliki nilai β sebesar -0,003 dan nilai sig 0,750 dapat dikatakan bila komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresifitas pajak.

Komisaris independen yang memoderasi kepemilikan manajerial dan agresifitas pajak memiliki nilai β sebesar -0,019 dan nilai sig 0,043 dapat dikatakan bila komisaris independen dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap agresifitas pajak. Komite audit yang memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap agresifitas pajak memiliki nilai β sebesar 0,021 dan nilai sig 0,000 dapat dikatakan bila komite audit tidak dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap agresifitas pajak.

Tabel 4.10
Ringkasan Penerimaan Hipotesis

Hipotesis	Hasil
H ₁ : Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresifitas pajak	Ditolak
H ₂ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresifitas pajak	Ditolak
H ₃ : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresifitas pajak	Diterima
H ₄ : Komisaris independen memperkuat hubungan negatif antara kepemilikan manajerial terhadap agresifitas pajak	Diterima
H ₅ : Komite audit memperkuat hubungan negatif antara kepemilikan manajerial terhadap agresifitas pajak	Ditolak

D. Pembahasan Hasil Analisis

1. Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Agresifitas Pajak.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap agresifitas pajak artinya hipotesis pertama ditolak. Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu konsekuensi dari teori legitimasi. Keberadaannya ditengah masyarakat mengharuskan perusahaan turut andil membangun ekonomi berkelanjutan

sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan pemerintah. Secara umum pengungkapan CSR merupakan bentuk penyampaian informasi tentang tanggungjawab perusahaan dalam bentuk pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dari dampak yang timbul akibat keberadaan perusahaan (Pradipta, 2015).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jessica dan Toly (2015) dan Wahyudi (2015) yang membuktikan pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap agresifitas pajak perusahaan. Indonesia dalam konteks negara timur dengan masyarakat yang terkenal memiliki kepedulian sosial tinggi nampaknya tidak sesuai dengan konsep tanggungjawab sosial yang ada. Rendahnya pengungkapan CSR mengindikasikan belum meratanya pemahaman perusahaan tentang pentingnya tanggungjawab sosial tersebut (Wahyudi, 2015).

Jessika dan Toly (2015) menyebutkan bila pengungkapan CSR bukanlah alasan bagi perusahaan melakukan tindakan pajak agresif dengan meminimalisir jumlah pajak terhutang. Hal ini karena melalui tanggungjawab sosial yang dilakukan perusahaan akan membantu pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang dalam jangka panjang akan menguntungkan perusahaan. Namun di Indonesia kesadaran perusahaan tentang pengungkapan CSR masih tergolong rendah. Peneliti menduga kesadaran pengungkapan CSR di Indonesia masih berkisar 13%.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresifitas Pajak.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresifitas pajak artinya hipotesis kedua ditolak. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi diluar perusahaan seperti bank, asuransi, pemerintah atau perusahaan lain. Kepemilikan institusional diukur menggunakan proporsi kepemilikan antara saham institusi terhadap jumlah saham beredar. Keberadaan pemilik saham institusi dalam perusahaan memberikan kewenangan untuk ikut mengawasi pengelolaan yang dilakukan manajemen. Semakin besar proporsi kepemilikan akan memberikan hak lebih besar untuk menjadi pemilik mayoritas dan menentukan jalannya perusahaan. Ditolaknya hipotesis kedua penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012), Jaya, dkk (2012), dan Handayani dan Aris (2015) yang membuktikan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap keputusan agresifitas pajak perusahaan.

Keberadaan pemilik saham oleh pihak diluar perusahaan diharapkan mampu menekan pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan pada setiap keputusan perusahaan. Akan tetapi pemilik institusional juga memiliki insentif untuk memastikan keputusan manajemen dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Tidak maksimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan pemilik saham institusional untuk mendisiplinkan dan memantau kinerja perusahaan memberikan akan peluang manajer berlaku oportunistis (Tandean, 2015).

Selain itu prioritas untuk mendapatkan laba lebih besar menjadi motif yang menyebabkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresifitas pajak. Jaya, (2012) berpendapat perusahaan mengharapkan dapat membayar pajak dengan nominal sekecil mungkin agar tidak mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Faktor tersebutlah yang melatarbelakangi perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak dan bukan karena adanya proporsi kepemilikan saham institusional dalam perusahaan (Jaya, 2012).

3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresifitas Pajak.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresifitas pajak yang artinya hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pramudito dan Sari (2015) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresifitas pajak perusahaan. Hubungan negatif ini menandakan semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial akan menekan tindakan agresifitas pajak perusahaan. Sebaliknya semakin kecil proporsi kepemilikan saham manajerial dapat berpotensi tindakan pajak agresif dalam perusahaan.

Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan kepada manajer atau direksi untuk berperan ganda yaitu sebagai pemegang saham sekaligus pengelola perusahaan. Persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen memberikan kesempatan manajer atau direksi untuk ikut menentukan arah kebijakan perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan semakin

besar proporsi kepemilikan saham oleh pihak *insider* dapat menekan benturan kepentingan yang membawa dampak negatif bagi perusahaan. Kesejajaran posisi ini akan membuat manajer atau direksi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan mengingat sebagai pemegang saham mereka akan ikut menanggung konsekuensi dari keputusan tersebut.

4. Pengaruh Komisaris Independen Pada Hubungan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresifitas Pajak.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dapat memoderasi hubungan kepemilikan manajerial terhadap agresifitas pajak perusahaan. Artinya hipotesis keempat diterima. Komisaris independen pada dasarnya adalah orang diluar perusahaan yang tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak terhadap kepemilikan perusahaan. Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang bertugas mengawasi kinerja perusahaan khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan. Untuk itu komisaris independen haruslah orang yang memahami peraturan perpajakan dan berkompeten dalam bidang akuntansi.

Pohan (2008) menjelaskan bahwa proporsi komisaris independen setidaknya sebesar 30% dari total dewan komisaris. Jumlah ini harus proporsional dengan jumlah pemegang saham yang tidak termasuk sebagai pemegang saham pengendali. Artinya, semakin banyak jumlah komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Meskipun tindakan pajak agresif bukanlah tindakan yang

illegal dan bertentangan dengan undang-undang namun secara sosial tindakan tersebut dianggap tidak etis dan merugikan pihak lainnya.

Utami dan Setyawan (2015) berpendapat pengawasan komisaris independen yang ketat dapat menekan kesempatan manajer berlaku agresif terhadap pajak. Pendapat tersebut sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa komisaris independen dibutuhkan dewan komisaris untuk mengawasi kinerja direksi berkaitan dengan sifat oportunistik yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain (Jensen dan Meckling, 1976). Hasil penelitian ini membuktikan komisaris independen dapat dijadikan moderasi dalam penelitian agresifitas pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Desai dan Dharmapala (2006) yang membuktikan *corporate governance* dapat mempengaruhi suatu determinan terhadap agresifitas pajak.

5. Pengaruh Komite Audit Pada Hubungan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresifitas Pajak.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa komite audit tidak dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap agresifitas pajak perusahaan. Artinya hipotesis kelima ditolak. Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang diharapkan dapat mengawasi kegiatan perusahaan khususnya yang berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan. Hal ini karena dalam proses penyusunan

laporan keuangan rentan dengan upaya meminimalisir jumlah pajak terhutang.

Tidak terbuktinya komite audit untuk memoderasi hubungan kepemilikan manajerial terhadap agresifitas pajak diduga karena jumlah dan keberadaan komite audit diperusahaan hanya digunakan sebagai pemenuhan terhadap regulasi yang ada. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Utami dan Setyawan (2015) yang menggunakan komite audit sebagai variabel moderasi dalam penelitian agresifitas pajak perusahaan. Utami dan Setyawan (2015) berpendapat tidak berpengaruhnya komite audit untuk memoderasi suatu penelitian terhadap agresifitas pajak dapat disebabkan karena penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia masih sebatas untuk pemenuhan regulasi.